



Pemprov Didesak Terapkan Teknologi Musnahkan Sampah

• SILVY DIAN SETIAWAN

Jika hal ini tidak dilakukan dengan segera, sampah akan terus menumpuk.

YOGYAKARTA — Permasalahan sampah yang dinilai kelebihan kapasitas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, perlu penanganan secara permanen. Terlebih, sejak ditutup Ahad (24/3) lalu membuat sampah di daerah lain yang membuang sampah di TPST Piyungan, menumpuk.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Huda Tri Yudian mengatakan, sampah yang selama ini dibawa ke TPST Piyungan hanya sebatas ditumpuk dan diurug. Sementara tidak ada langkah permanen untuk pemusnahan sampah yang dilakukan. "Solusi permanen TPST Piyungan adalah pemusnahan sampah, bukan sekadar ditumpuk dan ditimbun ta-

nah atau *sanitary landfill*," kata Huda dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan, pemusnahan sampah secara permanen harus segera diterapkan dengan menggunakan teknologi. Namun, Huda tidak menyebutkan teknologi seperti apa yang harus dimanfaatkan. Hal ini tentunya perlu kemauan keras dari pemerintah dalam menangani masalah sampah yang sudah melebihi kapasitas.

"Teknologi ini sangat banyak dan beragam dari dalam dan luar negeri sudah tersedia. Hanya perlu keberanian dari pemerintah DIY untuk segera memilih rekanan yang mampu dan sanggup melakukan pemusnahan dengan biaya paling rendah," katanya.

Ia menjelaskan, pemusnahan dengan teknologi tentunya membutuhkan biaya yang tinggi. Pemerintah pun dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. "Pemusnahan (dengan teknologi) ini membutuhkan biaya investasi ratusan miliar dan biaya rutin puluhan miliar per tahun. Seperti Seperti Surabaya dan DKI Jakarta misalnya," ujar Huda. Jika hal ini tidak dilakukan de-

ngan segera, sampah akan terus menumpuk. Bahkan, jika tidak dimusnahkan akan timbul berbagai permasalahan baru akibat sampah ini. "Timbul bau menyengat, sumber penyakit, pencemaran lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat," ujarnya.

Warga terdampak perlu diberi kompensasi

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri mengatakan, warga yang terdampak di sekitar TPST Piyungan dapat diberikan kompensasi. Namun, ia belum memperkirakan berapa kompensasi yang harus diberikan pemerintah sebagai penanggung jawab TPST tersebut.

"Kita dengar harapan warga dapat kompensasi. Tapi kita belum sampai pada angka berapa, apalagi patut atau tidak patut," kata Budhi saat dikonfirmasi.

Saat ini pihaknya masih fokus akan penanganan sampah ini. Terlebih, penutupan TPST ini mengakibatkan sampah menumpuk di beberapa wilayah di DIY. "Kita baru sampai pada problematika layanan

kebersihan terkait pengelolaan sampah ini bisa teratasi. Karena kalau dibiarkan bisa *chaos* ini," ujarnya.

Ia pun telah melakukan pengamatan ke TPST Piyungan. Pengerasan jalan pun sudah mulai dilakukan guna mengoptimalkan pengolahan sampah di kawasan tersebut. Terlebih, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul memang memanfaatkan TPST Piyungan sebagai tempat pembuangan sampah.

"Ini kan jadi masalah lingkungan yang serius. Ini seharusnya jadi perhatian yang prioritas dari pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan sampah di Kota Yogyakarta menumpuk akibat ditutupnya TPST sejak Ahad (24/3) lalu. Padahal selama ini sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dibuang ke TPST tersebut.

Kepala Dinas lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana mengatakan, pihaknya tidak bisa membuang sampah karena adanya penutupan ini. Saat ini, sampah menumpuk di seluruh TPS yang ada di Kota Yogyakarta. **red: fernan rahadi**

- Instansi
1. **DLH**
 2.
 3.
 4.
 5.

- ✓ Netral
- ✓ Segera
- ✓ Untuk

- Tindak Lanjut
- ✓ Ditunggapi
 - ✓ Diketahui
 - ✓ Tpa Pers

ks. MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005